

LAPORAN KINERJA

2022

BIRO KERJASAMA ANTAR PARLEMEN
DAN ORGANISASI INTERNASIONAL



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



KATA PENGANTAR



- Endah Tjahjani Dwirini R.
- Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional - Setjen DPR RI

Mengucap syukur Alhamdulillah tahun 2022 dapat dilalui dengan baik walaupun dengan berbagai tantangan yang dihadapi seperti peran DPR sebagai tuan rumah sidang internasional, pandemi COVID-19, keketuaan Indonesia di G20 hingga kebijakan nasional refocusing anggaran. Disisi lain berbagai isu baru global bermunculan, konflik Rusia – Ukraina, *food and energy security* hingga ancaman resesi global.

Dengan latar belakang suasana diplomasi internasional seperti itu, Biro Kerjasama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional menyampaikan laporan kinerja (LKj) tahun 2022. LKj adalah instrumen pertanggungjawaban terkait pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan sesuai Indikator Kinerja untuk mewujudkan visi dan misi organisasi, dan anggaran yang diamanatkan.

Berbagai temuan dan rekomendasi dalam LKj ini adalah sebagai evaluasi dan perbaikan kinerja kedepan.

Akhir kata, saran dan masukan untuk perbaikan kinerja Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional dan sangat diharapkan.

Terima kasih





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	v
EXECUTIVE SUMMARY	vi
I. PENDAHULUAN	1
I.1 Gambaran Umum	1
I.2 Dasar Hukum	1
I.3 Tugas Pokok dan Fungsi Serta Struktur Organisasi	2
I.4 Permasalahan Utama Yang Dihadapi Organisasi	3
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	5
II.1 Rencana Strategis Setjen DPR RI Tahun 2020-2024	5
II.2 Aspek Strategis Organisasi	5
II.3 Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2022	6
III. AKUNTABILITAS KINERJA	8
III.1 Capaian Kinerja Biro KSAP dan OI	8
III.2 Evaluasi Capaian Kinerja	9
III.3 Realisasi Anggaran	13
IV. PENUTUP	15
IV.1 Kesimpulan	15
IV.2 Rekomendasi	15
LAMPIRAN	17



DAFTAR GAMBAR & TABEL

Gambar 1. Tugas pokok dan fungsi Biro KSAP dan OI	2
Gambar 2. Struktur Organisasi Biro KSAP dan OI	3
Gambar 3. Visi, Misi dan Tujuan Sekretariat Jenderal DPR RI	5
Gambar 4. Indikator Kinerja Biro KSAP dan OI	7
Tabel 1. Pengukuran capaian kinerja Biro KSAP dan OI	8
Tabel 2. Persandingan capaian kinerja Biro KSAP dan OI tahun 2020 - 2022	9
Tabel 3. Persandingan capaian kinerja Biro KSAP dan OI tahun 2020 - 2022 (A)	10
Tabel 4. Persandingan capaian kinerja Biro KSAP dan OI tahun 2020 - 2022 (B)	11
Tabel 5. Persandingan capaian kinerja Biro KSAP dan OI tahun 2020 - 2022 (C)	11
Tabel 6. Persandingan capaian kinerja Biro KSAP dan OI tahun 2020 - 2022 (D)	12
Tabel 7. Realisasi Anggaran Satker Setjen Biro KSAP dan OI tahun 2022	13
Tabel 8. Persandingan realisasi anggaran Satker Setjen Biro KSAP dan OI	13
Tabel 9. Realisasi Anggaran Satker Dewan Biro KSAP dan OI tahun 2022	14
Tabel 10. Persandingan realisasi anggaran satker Dewan Biro KSAP dan OI	14

EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Kinerja (LKj) Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional (Biro KSAP dan OI) tahun 2022 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan, serta sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2022, sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja tahun mendatang, serta sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Biro KSAP dan OI dalam 1 (satu) tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Biro KSAP dan OI mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan kesekretariatan kerja sama antar parlemen dan organisasi internasional serta layanan alih bahasa. Fungsi tersebut didukung oleh 4 (empat) unit kerja setingkat eselon III dan kelompok jabatan fungsional.



Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian target kinerja di tahun 2022, Biro KSAP dan OI menghadapi beberapa permasalahan strategis yang berkaitan erat dengan dinamika internal dan eksternal yang terdiri atas:

1. Pada tahun 2022 Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) melakukan realokasi dan refocusing anggaran untuk DIPA tahun 2022. Kebijakan nasional ini memberikan efek yang cukup signifikan pada pelaksanaan kegiatan di Setjen DPR RI termasuk Biro KSAP dan OI.

Tujuan penyusunan LKj

Tugas Biro KSAP dan OI

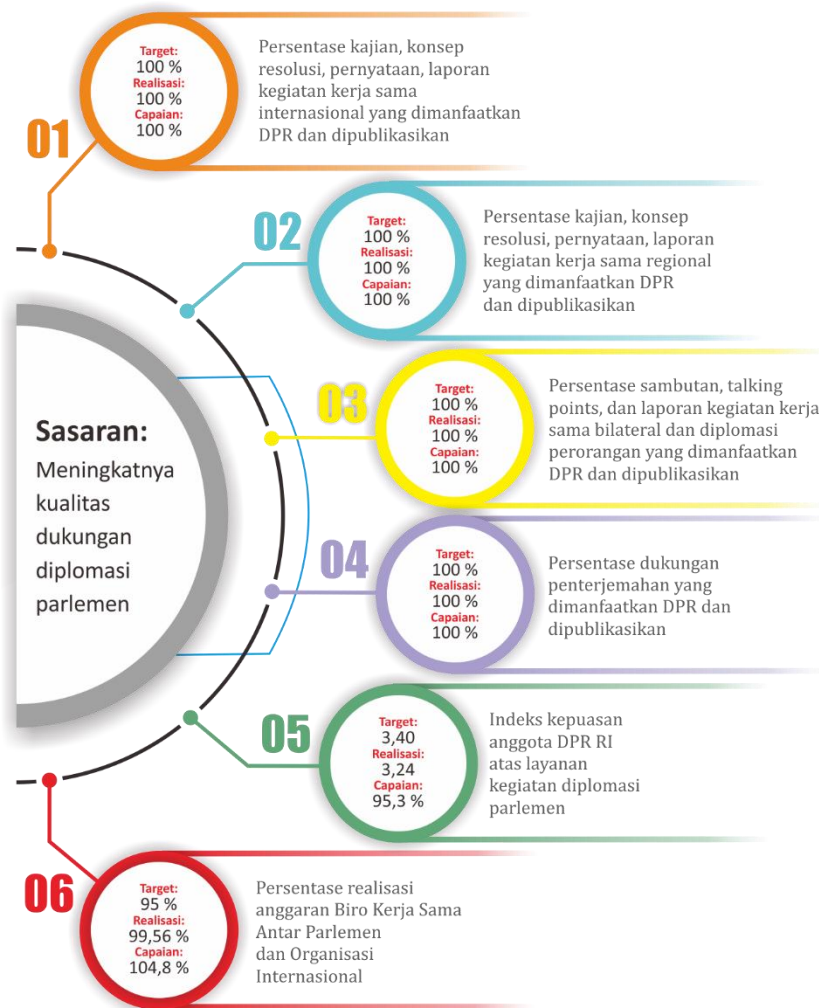
Struktur Biro KSAP dan OI

Permasalahan strategis Biro KSAP dan OI

2. Di Tahun 2022, Indonesia dalam hal ini DPR RI berkesempatan untuk menjadi tuan rumah 2 (dua) sidang internasional yaitu: the 144th IPU Assembly & Related Meeting yang diselenggarakan di Bali dan the 8th G20 Parliamentary Speakers' Summit (P20) yang dilaksanakan di Jakarta. Setjen DPR RI sebagai sistem pendukung, khususnya Biro KSAP dan OI, merupakan leading unit dalam pelaksanaan sidang internasional tersebut. Besarnya skala kegiatan serta waktu pelaksanaan di masa masa pandemi memberikan tantangan tersendiri bagi Biro KSAP dan OI. Selain itu keterbatasan anggaran di DIPA Setjen DPR RI (Biro KSAP dan OI) akibat kebijakan realokasi dan refocusing anggaran secara nasional juga menambah kompleksitas penyelenggaraan kedua sidang internasional tersebut.
3. Keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan kunjungan luar negeri Anggota DPR RI dalam rangka peran diplomasi Parlemen diantisipasi melalui strategi pemilihan negara dengan indeks biaya perjalanan dinas yang lebih rendah dari yang direncanakan di DIPA dan disesuaikan dengan penerimaan dari parlemen yang dituju. Di tahun 2022 direncanakan pengiriman 5 GKSAB, 3 Kunjungan Diplomasi BKSAP dan Kunjungan Perorangan Anggota untuk 115 Anggota . Realisasi kunjungan GKSAB dapat dilaksanakan sebanyak 6 kali, kunjungan diplomasi BKSAP terlaksana 5 kali sementara untuk kunjungan individu Anggota hanya terlaksana 66 kunjungan. Kunjungan Perorangan output tidak maksimal dikarenakan pemilihan negara kunjungan oleh anggota yang memiliki index perjadiin luar negeri yang tinggi.
4. Rangkaian kegiatan Presidensi Indonesia di Group of 20 (G20) yang berlangsung selama 1 tahun, mulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022, memunculkan tambahan kebutuhan sumber daya dan kegiatan bagi Biro KSAP dan OI terutama dalam keterlibatan DPR RI sebagai salah satu Engagement Group (Parliamentary 20) di G20.

Berdasarkan Renstra Setjen DPR RI, Biro KSAP dan OI telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2022 yang berisi sasaran program, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun serta capaian target yang telah ditetapkan sebagai berikut:

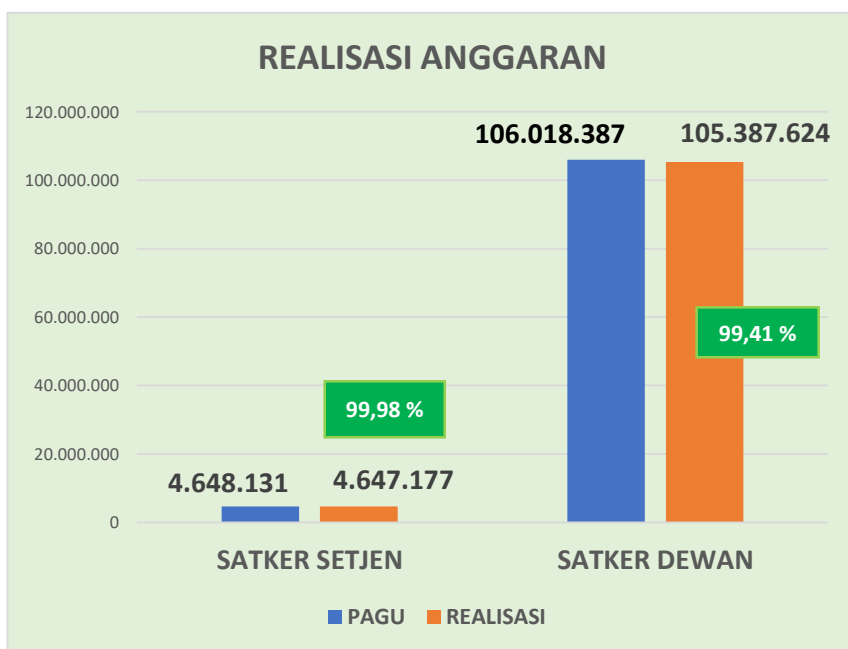




Target, realisasi dan capaian indikator kinerja Biro KSAP dan OI

Dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, Biro KSAP dan OI mengelola anggaran Satker Setjen dan Satker dewan tahun 2022 dengan rincian dan realisasi sebagai berikut:

Anggaran dan realisasi Biro KSAP dan OI



**Rekomendasi untuk
peningkatan
kinerja Biro KSAP
dan OI di masa
mendatang**

Secara umum sasaran program Biro KSAP dan OI sudah tercapai dengan baik, namun masih terdapat ruang untuk perbaikan dan tantangan yang perlu mendapat perhatian untuk selanjutnya menjadi rekomendasi untuk peningkatan kinerja Biro KSAP dan OI dimasa mendatang, antara lain:

1. Dalam meningkatkan kepuasan Anggota DPR RI atas layanan kegiatan diplomasi parlemen, perlu dilaksanakan penyelarasan antara bentuk layanan yang diberikan dengan harapan dan ekspektasi Anggota DPR RI sebagai penerima layanan. Penyelarasan ini juga perlu mempertimbangkan variabel-variabel yang diperhitungkan dalam pelaksanaan survei kepuasan oleh Setjen DPR RI. Selain itu Biro KSAP dan OI dalam menetapkan target kinerja dimasa yang akan datang perlu mengedepankan metode **S.M.A.R.T.** (*Spesific, Measureable, Attainable, relevant dan Time-Bond*) khususnya dalam pendekatan Attainable / penetapan target yang realistis dan dapat dicapai.
2. Menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran dengan lebih optimal dan menetapkan skala prioritas pelaksanaan kegiatan sebagai *exit strategy* dalam menghadapi risiko pelaksanaan refocussing/ realokasi anggaran di Setjen DPR RI/ secara nasional di masa yang akan datang.
3. Terkait Zona Integritas dan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang telah diraih, Biro KSAP dan OI diharapkan untuk terus berinovasi dalam memberikan layanan kepada stakeholder dan terus melakukan berbagai perbaikan dalam rangka mencapai predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM yang memiliki penguasaan substansi tentang isu – isu hubungan internasional baik bilateral, regional maupun internasional, serta disiplin ilmu lainnya melalui diklat/sekolah.
5. Pengembangan teknologi informasi (TI) dalam rangka peningkatan pelayanan kepada DPR-RI dan masyarakat, yaitu dengan updating database referensi BSAKP, inovasi aplikasi berbagai sistem kerja untuk kerja yang efektif dan efisien, dan update pemuatan informasi terbaru tentang BKSAP melalui web site DPR RI baik dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia.





**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**



I. PENDAHULUAN

I.1. GAMBARAN UMUM

Seuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945 Pasal 20A ayat (1), DPR RI memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan yang diatur selengkapnya dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Selain ke tiga fungsi tersebut, DPR RI juga memiliki fungsi lainnya yaitu diplomasi parlemen.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI, dibentuklah Sekretariat Jenderal DPR RI (Setjen DPR RI) sebagai aparatur pemerintah yang didalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR RI. Setjen DPR RI mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang persidangan, administrasi dan keahlian.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional (Biro KSAP dan OI) mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri PAN dan RB tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Setjen DPR RI nomor 2 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Setjen dan BK DPR RI.

LKj Biro KSAP dan OI tahun 2022 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan, serta sasaran yang telah ditetapkan di dalam Penetapan Kinerja Tahun 2022, sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja tahun mendatang, serta sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Biro KSAP dan OI dalam 1 (satu) tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

I.2. DASAR HUKUM

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI, dan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Persekjen Nomor 6 Tahun 2021 (*selanjutnya disebut Persekjen tentang Organisasi dan Tata Kerja*). Dalam Persekjen ini dijabarkan susunan organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI serta kedudukan, tugas dan fungsi dari Biro KSAP dan OI.

I.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI

Biro KSAP dan OI merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Deputi Bidang Persidangan. Tugas pokok dan fungsi Biro KSAP dan OI sebagaimana terdapat dalam gambar 1.



Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Biro KSAP dan OI didukung oleh 4 (empat) unit kerja setingkat eselon III dan kelompok jabatan fungsional yaitu:

1. Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Internasional;
2. Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional;
3. Bagian Sekretariat Kerja Sama Bilateral dan Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota;
4. Bagian Alih Bahasa; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Biro KSAP dan OI tergambar dalam gambar 2.



Gambar 2. Struktur Organisasi Biro KSAP dan OI

I.4. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI ORGANISASI

Permasalahan strategis yang dihadapi Biro KSAP dan OI berkaitan erat dengan dinamika internal dan eksternal yang terdiri atas:

1. Pada tahun 2022 Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) melakukan realokasi dan refocusing anggaran untuk DIPA tahun 2022. Kebijakan nasional ini memberikan efek yang cukup signifikan pada pelaksanaan kegiatan di Setjen DPR RI termasuk Biro KSAP dan OI.
2. Di Tahun 2022, Indonesia dalam hal ini DPR RI berkesempatan untuk menjadi tuan rumah 2 (dua) sidang internasional yaitu: the 144th IPU Assembly & Related Meeting yang diselenggarakan di Bali dan the 8th G20 Parliamentary Speakers' Summit (P20) yang dilaksanakan di Jakarta. Setjen DPR RI sebagai sistem pendukung, khususnya Biro KSAP dan OI, merupakan leading unit dalam pelaksanaan sidang internasional tersebut. Besarnya skala kegiatan serta waktu pelaksanaan di masa masa pandemi memberikan tantangan tersendiri bagi Biro KSAP dan OI. Selain itu keterbatasan anggaran di DIPA Setjen DPR RI (Biro KSAP dan OI) akibat kebijakan realokasi dan refocusing anggaran secara nasional juga menambah kompleksitas penyelenggaraan kedua sidang internasional tersebut.
3. Keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan kunjungan luar negeri Anggota DPR RI dalam rangka peran diplomasi Parlemen diantisipasi melalui strategi pemilihan negara dengan indeks biaya perjalanan dinas yang lebih rendah dari yang direncanakan di DIPA dan disesuaikan dengan penerimaan dari parlemen yang dituju. Di tahun 2022 direncanakan pengiriman 5 GKSB, 3 Kunjungan Diplomasi BKSAP dan Kunjungan Perorangan Anggota untuk 115 Anggota . Realisasi kunjungan GKSB dapat dilaksanakan sebanyak 6 kali, kunjungan diplomasi BKSAP terlaksana 5 kali sementara untuk kunjungan individu Anggota hanya terlaksana 66 kunjungan. Kunjungan Perorangan output tidak maksimal dikarenakan

pemilihan negara kunjungan oleh anggota yang memiliki index perjadin luar negeri yang tinggi.

4. Rangkaian kegiatan Presidensi Indonesia di Group of 20 (G20) yang berlangsung selama 1 tahun, mulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022, memunculkan tambahan kebutuhan sumber daya dan kegiatan bagi Biro KSAP dan OI terutama dalam keterlibatan DPR RI sebagai salah satu Engagement Group (Parliamentary 20) di G20.



II. PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

II.1. RENCANA STRATEGIS SETJEN DPR RI TAHUN 2020 – 2024

Berdasarkan Peraturan Sekjen DPR RI nomor 18 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekjen DPR RI nomor 10 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Setjen DPR RI tahun 2020 – 2024, untuk mendukung visi DPR RI, maka Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai unsur pendukung dalam pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI memiliki visi, misi dan tujuan sebagai berikut:



Gambar 3. Visi, Misi dan Tujuan Sekretariat Jenderal DPR RI

II.2. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Melalui perencanaan organisasi, sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana, administrasi serta dukungan teknis lainnya, Biro Kerja Sama antar Parlemen mendukung dan memiliki tanggung jawab dalam keberhasilan misi diplomasi Parlemen yang dilaksanakan oleh DPR RI.

Misi diplomasi DPR tersebut tidak saja melalui dialog atas berbagai isu-isu internasional dalam kerangka organisasi yang merangkum kerjasama keparlemenan dan kerjasama bilateral tetapi juga melalui pengawasan terhadap berbagai negosiasi internasional dan pelaksanaan berbagai kesepakatan yang sudah diadopsi oleh pemerintah. Sehingga dalam pelaksanaannya, perjanjian-perjanjian internasional tersebut selalu mendahulukan kepentingan nasional, sejalan dengan norma dan hukum internasional dan menjunjung tinggi penegakan hukum di dalam negeri. Salah satu contohnya, dimana BKSAP DPR RI telah mengambil peran strategis misalnya di daerah perbatasan. Mengingat negara-negara di kawasan Pasifik menganut sistem parlementer, peran DPR RI dalam kerangka *multi-track diplomacy* menjadi signifikan guna menyampaikan pandangan dan sikap pemerintah serta rakyat Indonesia yang tetap mengutamakan kedaulatan NKRI. Masalah kemerdekaan Palestina dan kontribusi terhadap krisis kemanusiaan warga Rohingya di Myanmar, juga masih menjadi fokus diplomasi BKSAP tahun 2022, selain juga issue Pembangunan Berkelanjutan.

Berbagai keterlibatan DPR RI di kancah internasional tersebut didukung oleh Biro KSAP dan OI sebagai bagian dari Kesekretariatan Jenderal yang memberikan dukungan teknis dan keahlian kepada Dewan.

Saat ini Biro KSAP bukan saja memberikan dukungan kepada anggota BKSAP yang berjumlah 52 orang, namun juga kepada Pimpinan DPR dan seluruh anggota DPR RI yang berjumlah 575 orang melalui program Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) dan kunjungan diplomasi parlemen perorangan. Bukan itu saja, Biro KSAP juga memberi dukungan kepada anggota parlemen sedunia yang menjadi anggota ASEAN *Parliamentarians against Corruption (SEAPAC)* mengingat saat ini Indonesia menjadi markas besar dari organisasi tersebut.

II.3. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI, Biro KSAP dan OI telah menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2022. Perjanjian kinerja berisi sasaran program, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Setiap sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tersebut diukur tingkat keberhasilan/kegagalannya pada akhir tahun. Penetapan Kinerja Biro KSAP dan OI tahun 2022 sebagaimana pada Gambar 4 berikut.



Gambar 4. Indikator Kinerja Biro KSAP dan OI

Untuk mendukung pencapaian sasaran program/ kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2022, telah dialokasikan dana pada satker Setjen untuk kegiatan Biro KSAP dan OI dengan pagu anggaran sebesar Rp4.648.131.000,00 (Empat miliar enam ratus empat puluh delapan juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh 4 (empat) unit kerja di lingkungan Biro KSAP dan OI.

III. AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. CAPAIAN KINERJA BIRO KSAP DAN OI

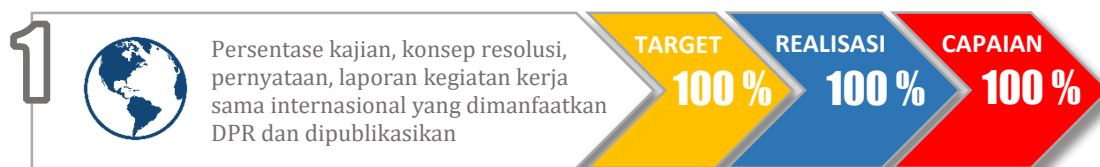
Sebagai perwujudan dari akuntabilitas kinerja dan alokasi anggaran yang disediakan, maka pengukuran kinerja ini menggambarkan pencapaian atas sasaran Program yang didasarkan pada indikator kinerja yang targetnya sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Pengukuran kinerja Biro KSAP dan OI Tahun 2022 sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 1 berikut.

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas dukungan Diplomasi Parlemen	1. Persentase kajian, konsep resolusi, pernyataan, laporan kegiatan kerja sama internasional yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan	100 %	100 %	100 %
		2. Persentase kajian, konsep resolusi, pernyataan, laporan kegiatan kerja sama regional yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan	100 %	100 %	100 %
		3. Persentase sambutan, talking points, dan laporan kegiatan kerja sama bilateral dan diplomasi perorangan yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan	100 %	100 %	100 %
		4. Persentase dukungan penterjemahan yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan	100 %	100 %	100 %
		5. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan kegiatan diplomasi parlemen	3,40	3,24	95,3 %
		6. Persentase realisasi anggaran Biro KSAP dan OI	95 %	99,56 %	104,8 %

Tabel 1. Pengukuran capaian kinerja Biro KSAP dan OI

III.2. EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Evaluasi capaian kinerja program dan indikator kinerja Biro KSAP dan OI tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:



Pada akhir tahun 2022, Presentase kajian, konsep resolusi, pernyataan, laporan kegiatan Kerjasama Internasional yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan, mencapai target sebesar 100%. Pencapaian ini sama dengan pencapaian di tahun 2021.

NO	INDIKATOR	2020		2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Persentase dukungan kegiatan kerjasama internasional yang sesuai standar	100 %	100 %	N.a.	N.a.	N.a.	N.a.
2.	Presentase kajian, konsep resolusi, pernyataan, laporan kegiatan Kerjasama Internasional yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan	N.a.	N.a.	100 %	100 %	100 %	100 %

* Perubahan indikator dilaksanakan berdasarkan perubahan Renstra Setjen

Tabel 2. Persandingan capaian kinerja Biro KSAP dan OI tahun 2020 – 2022

Kajian, konsep resolusi, pernyataan dan laporan kegiatan Kerjasama Internasional yang dimaksudkan disini adalah berbagai dokumen persiapan ketika DPR RI mengirimkan delegasi untuk menghadiri sidang-sidang Internasional, Biro KSAP sebagai supporting system menyiapkan berbagai kajian, konsep resolusi, dan juga laporan kegiatan bagi Anggota DPR RI yang menghadiri sidang-sidang tersebut. Laporan kegiatan telah dipublikasikan di website ksap.dpr.go.id.

Selain pengiriman delegasi menghadiri konferensi Internasional, Biro Kerjasama Antar Parlemen juga bertanggung jawab dalam mempersiapkan penyelenggaraan dua sidang internasional yang diselenggarakan di Indonesia yaitu *the 144th IPU Assembly and related meetings*, tanggal 20 – 24 Maret di *Bali International Convention Center (BICC) Nusa Dua Bali* dan pelaksanaan *The 8th G20 Parliamentary Speakers' Summit* di Komplek Gedung DPR RI tanggal 5 – 7 Oktober 2022 serta kegiatan Dewan lainnya seperti mempersiapkan pelaksanaan kegiatan kunjungan dalam negeri dalam rangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), BKSAP day serta beberapa kegiatan yang dilaksanakan secara Hybrid/ Virtual.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam lingkup kerja sama internasional antara lain terdiri atas:

1. 15 kegiatan rapat dan sidang internasional secara fisik;
2. 7 kegiatan rapat dan sidang internasional secara virtual;
3. 3 kegiatan kunjungan daerah (BKSAP day, Panja, dll)



Pada akhir tahun 2022, Presentase kajian, konsep resolusi, pernyataan, laporan kegiatan Kerjasama Regional yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan, mencapai target sebesar 100%. Pencapaian ini sama dengan pencapaian di tahun 2021.

NO	INDIKATOR	2020		2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Persentase dukungan kegiatan kerjasama regional yang sesuai standar	100 %	100 %	N.a.	N.a.	N.a.	N.a.
2.	Presentase kajian, konsep resolusi, pernyataan, laporan kegiatan Kerjasama Regional yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan	N.a.	N.a.	100 %	100 %	100 %	100 %

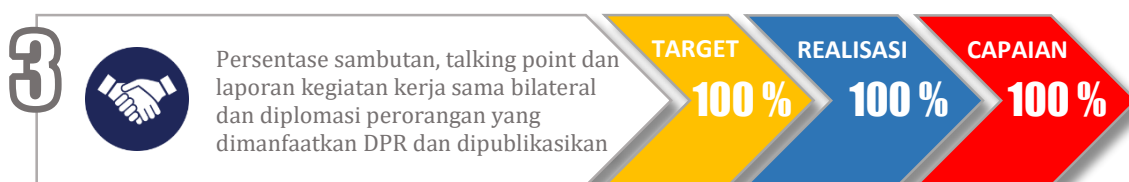
** Perubahan indikator dilaksanakan berdasarkan perubahan Renstra Setjen*

Tabel 3. Persandingan capaian kinerja Biro KSAP dan OI tahun 2020 – 2022 (A)

Selain menghadiri sidang-sidang Internasional, DPR RI juga menghadiri sidang-sidang regional oleh karena itu, yang dimaksud dengan indikator 2 disini adalah berbagai dokumen persiapan ketika DPR RI mengirimkan delegasi untuk menghadiri sidang – sidang Regional. Biro KSAP sebagai supporting system menyiapkan berbagai kajian, konsep resolusi, dan juga laporan kegiatan bagi Anggota DPR RI yang menghadiri sidang-sidang tersebut. Laporan kegiatan berbagai sidang regional juga telah dipublikasikan di website ksap.dpr.go.id.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam lingkup kerja sama regional antara lain terdiri atas:

1. 7 kegiatan rapat dan sidang regional secara fisik;
2. 9 kegiatan rapat dan sidang regional secara virtual;
3. 4 kegiatan kunjungan daerah (BKSAP day, Panja, dll)



Pada akhir tahun 2022, Presentase sambutan, talking points, dan laporan kegiatan Kerjasama Bilateral dan Diplomasi Perorangan yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan mencapai target sebesar 100%. Pencapaian ini sama dengan pencapaian di tahun 2021.

NO	INDIKATOR	2020		2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Persentase dukungan kegiatan bilateral yang sesuai standar	100 %	100 %	N.a.	N.a.	N.a.	N.a.
2.	Persentase dukungan kegiatan kerjasama diplomasi perorangan yang sesuai standar	100 %	100 %	N.a.	N.a.	N.a.	N.a.
3.	Persentase sambutan, talking points, dan laporan kegiatan Kerjasama Bilateral dan Diplomasi Perorangan yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan	N.a.	N.a.	100 %	100 %	100 %	100 %

* Perubahan indikator dilaksanakan berdasarkan perubahan Renstra Setjen

Tabel 4. Persandingan capaian kinerja Biro KSAP dan OI tahun 2020 – 2022 (B)

Untuk mendukung kegiatan bilateral, Biro KSAP juga menyiapkan dukungan bahan-bahan seperti sambutan, talking points maupun laporan-laporan kegiatan. Laporan pertemuan Courtesy Call maupun kegiatan bilateral lain maupun laporan kunjungan diplomasi perorangan juga telah dipublikasikan di website ksap.dpr.go.id.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam lingkup kerja sama bilateral dan perorangan antara lain terdiri atas:

1. 5 kegiatan kunjungan diplomasi;
2. 6 kegiatan kunjungan GKSB;
3. 66 kegiatan kunjungan perorangan;
4. 9 kegiatan kunjungan BKSAP Day;
5. 29 kegiatan courtesy call;
6. 14 kegiatan penerimaan tamu parlemen.



Pada akhir tahun 2022, presentase dukungan penterjemahan yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan, mencapai 100 %. Pencapaian ini sama dengan pencapaian di tahun 2021.

NO	INDIKATOR	2020		2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Presentase Dukungan Penterjemahan yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan	N.a.	N.a.	100 %	100 %	100 %	100 %

* Perubahan indikator dilaksanakan berdasarkan perubahan Renstra dan SOTK Setjen

Tabel 5. Persandingan capaian kinerja Biro KSAP dan OI tahun 2020 – 2022 (C)

Biro KSAP dan OI memberikan layanan penterjemahan tidak hanya kepada Anggota BKSAP, tetapi juga kepada Pimpinan DPR, Alat Kelengkapan Dewan dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Selain itu Biro KSAP dan OI juga melaksanakan penterjemahan sebagian pemberitaan di website DPR RI ke dalam bahasa Inggris.

Kegiatan penterjemahan yang dilaksanakan Biro KSAP dan OI antara lain terdiri atas:

1. 1.916 Tulisan
2. 243 Simultaneous Interpreting System (SIS)
3. 76 konsektif



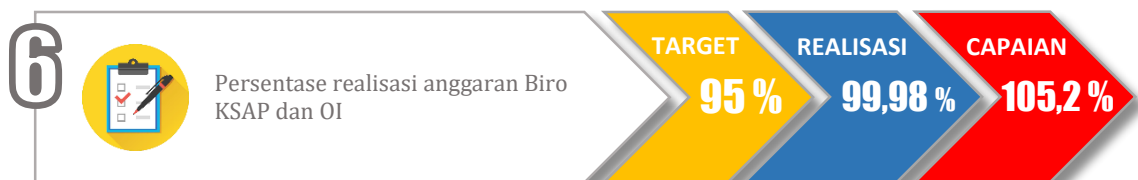
Capaian Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Kegiatan Diplomasi Parlemen tahun 2022 adalah sebesar 95,3 %, karena dari target nilai 3,40 diperoleh hasil nilai survey sebesar 3,24. realisasi capaian target Indeks kepuasan ini tidak memenuhi target sebesar 0,16 poin. Namun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021, indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan kegiatan diplomasi parlemen mengalami peningkatan sebesar 0,02 poin. Hasil penghitungan indeks kepuasan ini diperoleh dari hasil survey yang diberikan kepada para Anggota DPR RI yang telah menerima layanan kegiatan diplomasi parlemen. Tabel 6 berikut menggambarkan persandingan target dan capaian indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan kegiatan diplomasi parlemen tahun 2020 sd 2022.

NO	INDIKATOR	2020		2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Kegiatan Diplomasi Parlemen	N.a.	N.a.	3,22	3,22	3,40	3,24

* Perubahan indikator dilaksanakan berdasarkan perubahan renstra Setjen

Tabel 6. Persandingan capaian kinerja Biro KSAP dan OI tahun 2020 – 2022 (D)

Capaian realisasi target sebesar 95,3 % di tahun 2022 merupakan indikasi bahwa Biro KSAP dan OI perlu meningkatkan kinerjanya terutama dalam memberikan layanan kegiatan diplomasi parlemen kepada Anggota DPR RI. Selain itu perlu dilakukan penyelarasan antara bentuk layanan yang diberikan Biro KSAP dan OI dengan harapan dan ekspektasi Anggota DPR RI Sebagai penerima layanan serta variabel-variabel yang diperhitungkan dalam pelaksanaan survei kepuasan. Penetapan target kinerja dimasa yang akan datang juga harus mengedepankan metode **S.M.A.R.T.** (*Specific, Measurable, Attainable, relevant dan Time-Bond*) khususnya dalam pendekatan Attainable / penetapan target yang realistis dan dapat dicapai.



Capaian Indikator persentase realisasi anggaran Biro KSAP mencapai 105,2 %, dimana dari target 95% berhasil terealisasi hingga 99,98 % dari total anggaran Biro KSAP. Secara lebih rinci capaian anggaran ini akan dijelaskan dalam bagian realisasi anggaran.

III.3. REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mendukung fungsi Dewan, Biro KSAP dan OI ditunjang dengan anggaran yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022. Dalam DIPA tersebut, Biro KSAP mengelola 2 Satuan Kerja (Satker) Anggaran, yaitu Satker Setjen dan Satker Dewan. Dengan DIPA tersebut Biro KSAP melaksanakan tugas dan fungsi Biro KSAP melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kinerja.

1. Kinerja Anggaran Satker Setjen

Biro KSAP dan OI mengelola anggaran Satker Setjen dengan Pagu sebesar Rp4.648.131.000,00 dimana telah direalisasikan sebesar Rp4.647.177.365,00 atau 99,98 %. Anggaran tersebut digunakan antara lain untuk:

- Perumusan Bahan Kebijakan Biro KSAP;
- Fasilitasi Kerja Sama Organisasi Internasional, Regional, Bilateral dan Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota;
- Pelaksanaan Pengiriman Penerjemah dalam rangka pengembangan SDM, dan kegiatan-kegiatan pendidikan serta seminar di daerah dan luar negeri;
- Pelaksanaan Pengiriman Delegasi Setjen dan BK DPR RI ke Sidang IPU untuk menghadiri pertemuan Association of Secretaries General of Parliaments.

NO	KEGIATAN	PAGU 2022	REALISASI	% REALISASI
1	Anggaran Biro Kerjasama Antar Parlemen	3.591.473.000	3.590.519.365	99,97
2	Bagian Set. KSO Internasional	297.697.000	297.697.000	100
3	Bagian Set. KSO Regional	270.411.000	270.411.000	100
4	Bagian Set. KSB dan Minluna	209.200.000	209.200.000	100
5	Bagian Alih Bahasa	279.350.000	279.350.000	100
Jumlah		4.648.131.000	4.647.177.365	99,98

Tabel 7. Realisasi Anggaran Satker Setjen Biro KSAP dan OI tahun 2022

Perbandingan realisasi anggaran Satker Setjen dalam kurun waktu tahun 2020 sd. 2022 dijelaskan dalam tabel 8 berikut.

TAHUN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
2020	1.614.438.000	1.596.080.250	98,86
2021	4.418.351.000	4.287.822.120	97,05
2022	4.648.131.000	4.627.752.365	99,56

Tabel 8. Persandingan Realisasi Anggaran Satker Setjen Biro KSAP dan OI



2. Kinerja Anggaran Satker Dewan

Dari total Pagu anggaran tahun 2022 untuk Satker Dewan sebesar Rp106.018.387.000,00 dimana telah direalisasikan sebesar Rp105.387.627.152,00 atau 99,41 %. Anggaran Satker Dewan digunakan untuk penyelenggaraan konferensi dalam negeri, pengembangan hubungan kerja sama luar negeri dan pelaksanaan peran diplomasi Anggota DPR RI.

NO	KEGIATAN	PAGU 2022	REALISASI	% REALISASI
1	Kerja Sama Internasional	60.449.329.000	60.323.020.159	99,79
2	Kerja Sama Regional	8.422.477.000	8.299.930.177	98,55
3	Kerja Sama Bilateral	35.666.943.000	35.286.494.436	98,93
4	Alih Bahasa	1.479.638.000	1.478.182.380	99,90
Jumlah		106.018.387.000	105.387.627.152	99,41

Tabel 9. Realisasi Anggaran Satker Dewan Biro KSAP dan OI tahun 2022

Perbandingan realisasi anggaran Satker Dewan dalam kurun waktu tahun 2020 sd. 2022 dijelaskan dalam tabel 10 berikut.

TAHUN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
2020	38.069.231.000	21.189.912.620	55,66
2021	71.158.094.000	53.101.686.414	74,62
2022	106.018.387.000	105.387.627.152	99,41

Tabel 10. Persandingan Realisasi Anggaran Satker Dewan Biro KSAP dan OI

IV. PENUTUP

IV.1. KESIMPULAN

Dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pengganti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal DPR RI serta amanat reformasi birokrasi khususnya area perubahan Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Biro KSAP dan OI telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas rencana kerja dan penetapan kinerja yang telah ditetapkan. Biro KSAP dan OI terus berupaya melakukan perbaikan secara berkesinambungan sebagai wujud komitmen untuk selalu meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Laporan Kinerja Biro KSAP dan OI Tahun 2022 menjabarkan capaian atas Indikator Kinerja yang mencerminkan capaian kinerja sasaran program/ kegiatan yang ingin dicapai oleh Biro KSAP dan OI. Secara umum tujuan, sasaran dan kegiatan di Biro KSAP dan OI telah dilaksanakan dengan optimal dimana semua kegiatan yang dilaksanakan telah memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian target Biro KSAP dan OI, serta pencapaian tujuan Setjen DPR RI.

IV.2. REKOMENDASI

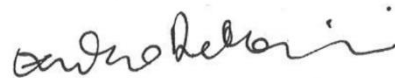
Secara umum sasaran program/ kegiatan Biro KSAP dan OI sudah tercapai dengan baik, namun masih terdapat ruang untuk perbaikan dan tantangan yang perlu mendapat perhatian untuk selanjutnya menjadi rekomendasi untuk peningkatan kinerja Biro KSAP dan OI di masa mendatang, antara lain:

1. Dalam meningkatkan kepuasan Anggota DPR RI atas layanan kegiatan diplomasi parlemen, perlu dilaksanakan penyelarasan antara bentuk layanan yang diberikan dengan harapan dan ekspektasi Anggota DPR RI sebagai penerima layanan. Penyelarasan ini juga perlu mempertimbangkan variabel-variabel yang diperhitungkan dalam pelaksanaan survei kepuasan oleh Setjen DPR RI. Selain itu Biro KSAP dan OI dalam menetapkan target kinerja dimasa yang akan datang perlu mengedepankan metode **S.M.A.R.T.** (*Specific, Measureable, Attainable, relevant dan Time-Bond*) khususnya dalam pendekatan Attainable / penetapan target yang realistis dan dapat dicapai.
2. Menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran dengan lebih optimal dan menetapkan skala prioritas pelaksanaan kegiatan sebagai *exit strategy* dalam menghadapi risiko pelaksanaan refocussing/ realokasi anggaran di Setjen DPR RI/ secara nasional di masa yang akan datang.
3. Terkait Zona Integritas dan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang telah diraih, Biro KSAP dan OI diharapkan untuk terus berinovasi dalam memberikan

layanan kepada stakeholder dan terus melakukan berbagai perbaikan dalam rangka mencapai predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

4. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM yang memiliki penguasaan substansi tentang isu – isu hubungan internasional baik bilateral, regional maupun internasional, serta disiplin ilmu lainnya melalui diklat/sekolah.
5. Pengembangan teknologi informasi (TI) dalam rangka peningkatan pelayanan kepada DPR-RI dan masyarakat, yaitu dengan updating database referensi BSAKP, inovasi aplikasi berbagai sistem kerja untuk kerja yang efektif dan efisien, dan update pemuatan informasi terbaru tentang BKSAP melalui web site DPR RI baik dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia.

Jakarta, 4 Januari 2022
Kepala Biro KSAP dan OI



Endah T.D. Retnoastuti
NIP. 196804021993022001

LAMPIRAN



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 SATKER SETJEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Endah Tjahjani Dwirini R., S.S., M.Phil.
Jabatan : Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Damayanti, M.Si.
Jabatan : Deputi Bidang Persidangan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan bekerja keras untuk dapat mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dra. Damayanti, M.Si.
NIP. 19620211 198703 2 002

Jakarta, 21 Desember 2021
Pihak Pertama,

Endah Tjahjani Dwirini R., S.S., M.Phil.
NIP. 19680402 199302 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Meningkatnya kualitas dukungan Diplomasi Parlemen	1.	Persentase kajian, konsep resolusi, pernyataan, laporan kegiatan Kerjasama Internasional yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan	100%
		2.	Persentase kajian, konsep resolusi, pernyataan, laporan kegiatan Kerjasama Regional yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan	100%
		3.	Persentase sambutan, talking points, dan laporan kegiatan Kerjasama Bilateral dan Diplomasi Perorangan yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan	100%
		4.	Persentase Dukungan Penterjemahan yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan	100%
		5.	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Kegiatan Diplomasi Parlemen	3,4
		6.	Persentase realisasi anggaran Biro Kerja Sama Antar Parlemen	95%

Program	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp.4.789.033.000,-

Deputi Bidang Persidangan,

Dra. Damayanti, M.Si.
NIP. 19620211 198703 2 002

Jakarta, 21 Desember 2021
Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen
Dan Organisasi Internasional,

Endah Tjahjani Dwirini R., S.S., M.Phil.
NIP. 19680402 199302 2 001





Produced by:

**BIRO KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN DAN
ORGANISASI INTERNASIONAL**

email: biro_ksap@dpr.go.id

phone: (+62 21) 5715813

ksap.dpr.go.id

2023



@bksapdpr



bksapdpr